

**EVALUASI PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR TERPADU CITARUM
(Studi Kasus Hulu DAS Citarum Kabupaten Bandung)**

Dina

dina.shusein@gmail.com

**Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Al-Ghifari Bandung**

Abstrak

Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk memperbaiki sungai Citarum, salah satunya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) tetapi kenyataannya tiap tahun kondisinya makin kritis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) berdasarkan konsep Jones (1991: 359) tipe evaluasi kebijakan yaitu: 1. *Political Evaluation*; 2. *Organizational evaluation*; 3. *Substantive evaluation* dan konsep Riant Nuguroho (2011 : 665) bahwa pengendalian kebijakan terdiri dari: 1. Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan; 2. Evaluasi kebijakan; 3. Penganjuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa belum dilakukan pengendalian, masih dalam menginventarisir permasalahan untuk menyamakan database permasalahan yang ada. umpan balik masih berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak - pihak pelaksana yang merupakan organisasi-organisasi pemerintah/instansi pemerintah. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak ada penganjuran baik *reward* dan *punishment* terhadap sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air Citarum.

Kata kunci : Evaluasi kebijakan, Pengelolaan Sumber Daya Air, ICWRMIP, DAS Citarum

Abstract

Various policies and programs have been implemented to restore Citarum river, one of them is the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) but in fact every year its condition is increasingly critical. This study aims to evaluate performance appraisal of the implementation of Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) based on the concept of Jones (1991: 359) type of policy evaluation: 1. Political Evaluation; .organizational evaluation; 3. Substantive evaluation and concept of Riant Nuguroho (2011: 665) that policy control consists of: 1. Monitoring policy or policy supervision; 2. Evaluation of the policy; 3. Revaluation. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Informant determination technique used with purposive sampling technique. Data collection techniques by conducting in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The results of the research there has not done the control, still in inventory problem to equalize database of existing problem. feedback is still a solution tried by the implementing agencies who are government organizations. This is also possible happen because there is no reward and punishment reward for human resources who involved in the management of Citarum Water Resources.

Keywords: Evaluation of policy, Water Resource Management, ICWRMIP, Citarum Watershed

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Menyadari bahwa Program Kali Bersih (PROKASIH) belum optimal pada tahun 2002, Pemerintah merancang sebuah program pemulihan terpadu yang disusun dalam suatu roadmap. Perencanaan roadmap ini dikoordinasi oleh Bappenas bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. *Roadmap* ini dituangkan melalui ICWRMIP (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*) atau Program Investasi Manajemen Sumber Daya Air Citarum Terpadu. ICWRMIP adalah program jangka panjang 15 tahun, dimulai dari 2010-2025. Hal ini didasarkan pada Undang Undang Nomor:7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam sumber daya air merupakan hal

yang harus dilakukan. Untuk mendukung program ini telah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 6 No.04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai. Kemudian terdapat pula Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 594/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Cibaliung-Citarum (WS 6 CI) yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor.224/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum. Untuk mendukung program ini Pemerintah Daerah Jawa Barat juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :050.05/Kep.1589-Bapp/2011 tentang Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Optimalisasi Kerjasama Institusi dalam Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang ditemui peneliti adanya tanggapan masyarakat yang menyatakan belum tegasnya pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran air yang berkaitan dengan pemberian sanksi, belum terciptanya ipal industri terpadu yang dikoordinasi oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan perusahaan diharuskan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri, tetapi karena alasan biaya dan tempat yang tidak memadai hingga akhirnya para pelaku industri membuang limbahnya langsung ke badan sungai.

Kemudian, masyarakat untuk terlibat dalam wadah koordinasi dalam penanganan Citarum sangat minim, hal itu bisa dilihat dari rendahnya respon dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendaftarkan lembaganya secara sukarela untuk bergabung dalam wadah koordinasi tersebut, padahal tentang perekrutan organisasi tersebut sudah disosialisasikan melalui media cetak (Cita Citarum, 2011). Akhirnya, LSM atau organisasi masyarakat sipil yang terlibat berdasarkan hasil sharing BBWS dan info dari

Kesbanglinmaspol. Pada BPLHD Jawa Barat, berdasarkan observasi awal peneliti melihat belum efektifnya koordinasi antar stakeholder baik itu program pusat, propinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan sumber daya air dalam hal ini pencemaran sungai, koordinasi *inter governmental* dan koordinasi *inter organization* yang ada masih berbentuk formalitas dengan menghadiri undangan rapat.

Hal ini menunjukkan masih terdapat ego sektoral dalam menjalankan program masing-masing. Kemudian dalam pelaksanaannya untuk mengurangi pencemaran di Sungai Citarum pihak BPHLD Jabar masih sebatas hanya mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, yang informasinya didapatkan dari Dinas Peindustrian dan Perdagangan Jawa Barat tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran, dari data tersebut dilakukan inventarisir dan identifikasi sumber pencemaran kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Jawa Barat tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan pencemaran untuk ditindak lanjuti.

Sehingga belum ada kewenangan atau badan penanganan terpadu yang berperan untuk melakukan pencabutan izin atau *punishment* secara langsung. Belum efektifnya evaluasi Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICRWMIP)* di Kabupaten Bandung merupakan masalah yang layak diteliti untuk mencari alternatif solusi bagi governance dan struktur organisasi pelaksana di daerah.

Perumusan masalah

Bagaimana evaluasi Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICRWMIP)* di Kabupaten Bandung dilaksanakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan karena menurut Creswell (1994:44) metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan metode kualitatif, diharapkan peneliti mampu untuk mengungkapkan secara komprehensif bagaimana evaluasi kebijakan ICWRMIP dilaksanakan. Data dan informasi diperoleh dari studi awal yakni dari Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Citarum, Selanjutnya Tim Sinkronisasi Perencanaan antar instansi (SPOKI) Kabupaten Bandung. Data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder dan data primer, baik melalui penelusuran data berupa dokumen resmi seperti: sekretariat TKPSDA, Bappeda Kabupaten Bandung, badan atau lembaga pemerintah yang terkait, website resmi Pemerintah tentang Citarum serta pengumpulan data primer melalui kegiatan wawancara terhadap sejumlah informan kunci (key informan) dan berdiskusi dengan sejumlah informan..

Metode pengumpulan data adalah Studi Pustaka, Wawancara mendalam, dan Observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah induksi analitik. Teknik ini bertolak dari problem atau isu spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengembangkan model deskriptif penelitiannya. Data dikumpulkan dengan wawancara bebas, dan dapat pula digunakan lewat observasi partisipan dan analisis dokumentasi. Hal ini dilakukan melalui: Reduksi data, Display data, lalu mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk kasus, narasi atau deskripsi atas fenomena tertentu. Manfaat dari penelitian

kualitatif menurut Moleong (2000:7) diantaranya adalah untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya dan untuk melakukan evaluasi.

Kajian Pustaka

Konsep Evaluasi Kebijakan.

Menurut Anderson (1979:151) pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah *“the appraisal or assessment of policy, including its content implementation and impact”*. Evaluasi kebijakan dapat diartikan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi, evaluasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bersifat fungsional, yaitu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan pada seluruh proses kebijakan sehingga evaluasi kebijakan akan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, kebijakan-kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, evaluasi maupun tahap dampak kebijakan. Oleh karenanya menurut Anderson kemudian, sebagai kegiatan yang bersifat fungsional maka evaluasi kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. adapun yang dimaksudkan dengan suatu kegiatan yang bersifat fungsional adalah, kegiatan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan akan *cover* seluruh proses yang dimulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, kebijakan-kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, evaluasi maupun tahap dampak kebijakan.

Jones (1991:359) menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 tipe tujuan pelaksanaan evaluasi kebijakan yaitu :

- 1) *Political Evaluation* (evaluasi untuk kepentingan politik). Kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan “apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi seluruh negara. Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan meningkatkan dukungan politik dalam kampanye ulang, apakah

kebijakan yang akan dilakukan akan meningkatkan dukungan dari media.

- 2) *Organizational evaluation*. Evaluasi untuk kepentingan organisasi. Evaluasi organisasi berangkat dari pertanyaan apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana yang ada. Apakah manfaat yang akan diterima oleh badan-badan pelaksana, akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan dapat memberikan perluasan terhadap badan-badan pelaksana.
- 3) *Substantive evaluation* (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) evaluasi substantif adalah untuk melihat “apakah kebijakan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditetapkan (dalam undang-undang atau dalam bentuk spesifikasi tertentu). Apa bentuk dampak yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap permasalahan.

Berdasarkan perangkat evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas, maka Jones (1991:4) selanjutnya menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dipergunakan untuk dua kepentingan yaitu :

- 1) Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah *tools* untuk melihat kembali, kemudian mengantisipasi atau menilai semua kemajuan yang dapat dicapai oleh pemerintah kebijakan yang disusun dan kemudian dievaluasikan.
- 2) Merupakan upaya yang sistematis, untuk menilai manfaat dari kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi metode-metode yang sistematis untuk menilai kebijakan-kebijakan pemerintah seperti metode eksperimental, metode perbandingan, replikasi atau analisis biaya manfaat.

Rosenbloom (2005:380) menjelaskan, analisis kebijakan yang sistematis mulai menjadi standar dalam fungsi administrasi publik pada era 1960 dan 1970an. Ini dapat menjadi demikian oleh karena semakin kuatnya peran dan fungsi administrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik

itu dalam aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Adapun tentang hal ini dapat dilihat pada penjelasannya di bawah ini :

“A systemic policy analysis only became a standard public administrative function in the 1960s and 1970s. In part this was due to a shift in the nature of administrative intervention in 1960s that made public administration more salient in the workplace, in neighborhoods, in families, and in society. (2005:380). Public administrative intervention in the economy, society and polity makes policy analysis more salient” (2005 : 381).

Berkaitan dengan penjelasannya ini, Rosenbloom (2005 ; 381) juga mengemukakan bahwa *“public administrative intervention in the economy, society, and polity makes policy analysis more salient”*. Oleh karena peran yang semakin besar dari administrasi publik di seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka ini juga berarti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh administrasi negara. Konsekuensi dari keadaan ini semakin berkembangnya berbagai pendekatan analisis kebijakan, metode ilmiah dan teknik analisa statistik Menurut Rosenbloom (2005 : 390) kemudian, analisis kebijakan dan evaluasi dibutuhkan oleh para politisi dan administrator publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan (2005 : 414). Tetapi menurutnya, evaluasi terhadap evaluasi kebijakan adalah tergantung pada analisis kebijakan. Namun demikian keduanya adalah kegiatan yang berbeda. Idealnya analisa restropektif dan evaluasi akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan dalam jangka pendek. Dengan demikian berdasarkan pemikiran Rosenbloom ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk kepentingan evaluasi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan sesungguhnya adalah bagian yang amat penting dari sebuah kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menjadi sebuah alat penting untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa sebuah kebijakan berhasil maupun

tidak berhasil dilaksanakan. Dengan mencermati tujuan dan cara evaluasi itu dilakukan, maka melalui proses evaluasi kebijakan dapat ditemukan pada bagian mana dari sebuah mekanisme hambatan atau kelemahan itu terjadi. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah referensi untuk merevisi kembali kebijakan publik yang dibuat.

Berkaitan dengan kegiatan evaluasi, kebijakan Howlet dan Ramesh (2003:210) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah bergantung pada evaluator dari kebijakan itu sendiri. sebagaimana penjelasan mereka di bawah ini :

“The presence of distinct types of policy evaluators results in several distinct types of policy analysis and evaluation. At a general level, policy evaluation can be classified into three broad categories: administrative evaluation, judicial evaluation, and political evaluation. Which differ in the way are conducted, the actors they involve, and their effects. In what follows, the key venues for this kinds of policy evaluation are set out; along with a description of the actors involved in these processes and their activities”.

Penjelasan dari Howlet dan Ramesh di atas, pada dasarnya menggambarkan bahwa keberadaan keragaman evaluator kebijakan, menghasilkan pula hasil analisis dan evaluasi kebijakan yang berbeda-beda. Sementara itu umumnya , evaluasi kebijakan dapat digolongkan menjadi 3 kategori: evaluasi administratif, legal/yudisial, dan evaluasi politik. Perbedaan di antara ketiganya adalah terletak pada :

- 1) Mekanisme kegiatan analisis atau evaluasi yang dilakukan.
- 2) Orang-orang atau para aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
- 3) Dampak yang dihasilkan yang pada akhirnya evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh perencana kebijakan tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan konseptual di atas jelas bahwa sesungguhnya esensi persoalan kebijakan publik adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketika hasil dari kebijakan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Persoalan mengapa kebijakan publik tidak dapat dievaluasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau kebijakan itu gagal atau tidak dapat dievaluasikan.

Hasil pemaknaan (atas rujukan konsep-konsep yang dikemukakan di atas) ini, dapat dikorelasikan dengan pemikiran dari Mustopadidjaja (2003:46) yang selanjutnya menjelaskan tentang evaluasi kebijakan, yaitu bahwa evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. menurutnya kemudian, bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.

Lebih lanjut Mustopadidjaja (2003:45) menjelaskan, lingkup evaluasi kebijakan secara komprehensif pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan atau pertanggungjawaban. Pada tiap tahapannya, berisikan kegiatan-kegiatan mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian dari setiap hasil kegiatan, ketepatan waktu dan proses pelaksanaan serta akuntabilitas secara keseluruhan. Menurutnya bahwa evaluasi merupakan pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau jangka waktu tertentu, sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki. Menurut Mustopa kemudian, bahwa terdapat 3 fase evaluasi kebijakan yaitu :1).*Specification of the evaluation topic*, 2).*Design of the evaluation procedure*, 3).*Implementation of the evaluation*.

Nugroho (2009:535) kemudian mengemukakan pemikirannya bahwa “sebuah kebijakan publik tidak dapat *dilepas begitu saja*. Kebijakan harus *diawasi* dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah evaluasi kebijakan”. Menurutnya kemudian, evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan itu dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Jadi sebenarnya

evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki “kesenjangan” yang ada. Adapun ciri-ciri dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) Menemukan hal-hal yang strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- 2) Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan.
- 3) Menghasilkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- 4) Dapat dilaksanakan dalam suasana yang kondusif.
- 5) Pelaksanaan evaluasi kebijakan mencakup rumusan, evaluasi. Lingkungan dan kinerja kebijakan.

Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum menggunakan pendekatan *Integrated Water Resource Management (IWRM)* yang berdasarkan konsep dari *Global Water Partnership (GWP:2008)* yang menyatakan bahwa :

“IWRM is a process which promotes the coordinated development and management of water, land, related resources, in order to maximize the resultant economic and social welfare in equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystem”.

Pada definisi di atas bahwa koordinasi merupakan cara yang digunakan dalam melakukan pengelolaan air, wilayah dan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan ekonomi masyarakat tanpa merusak ekosistem.

IWRM juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menangani permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum yang mengupayakan adanya keterlibatan publik. Hal ini dilakukan karena selama ini program-program yang telah ada belum efektif menangani pencemaran sungai. Dalam menangani pencemaran Sungai Citarum masyarakat belum dilibatkan

secara aktif untuk berpartisipasi sehingga masyarakat menjadi objek dalam suatu program yang ada. Kemudian masih terdapatnya *gap* atau kesenjangan antara pemerintah pusat, daerah dan lokal dalam mengakses informasi tentang penanganan Sungai Citarum secara keseluruhan, hal ini dikarenakan mereka hanya melakukan tugas pokok yang diberikan tanpa mengetahui rencana detail keseluruhan.

Hal ini mengesankan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersifat masing-masing. Padahal secara konsep pengelolaan terpadu ini merupakan lintas sektoral baik pusat, daerah dan lokal dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dengan adanya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:197/KPTS/M/2014 diharapkan perencanaan masing-masing organisasi yang terlibat baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang berada di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat sinergi dan menjadi satu padu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Bryant dan White (1987:191) pemantauan adalah merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan ketika kegiatan/proyek sedang berlangsung sebagai umpan balik sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian segera jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak atau belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beda halnya dengan Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) yang memaknai pemantauan merupakan pemeriksaan berkelanjutan (terus-menerus) terhadap hasil akhrit dari laporan pengawasan berjenjang. Kemudian Bryant dan White (1987:193) juga menyatakan bahwa proses pemantauan juga dibutuhkan guna memeriksa sistem manajemen khususnya yang berhubungan dengan jenis-jenis insentif yang tersedia bagi para pelaksana dan manajer dalam melakukan pekerjaannya masing-masing.

Evaluasi lebih mengarah kepada kata pengendalian. Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) menyatakan pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai dengan tindakan pelurusan (korektif), Sedangkan Pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada beberapa periode tertentu, sehingga pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.

Umpan balik yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya dapat dipergunakan sebagai masukan dalam melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang akan datang. Kemudian Wibowo (2010:166) menyatakan bahwa umpan balik pada organisasi berkenaan dengan monitoring, sehingga apakah nantinya terjadi deviasi antara rencana dengan pelaksanaan dan memprediksi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu ditetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaikinya sehingga tujuan tetap dapat tercapai.

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Konsultan Independent untuk memulihkan kondisi WS Citarum. Sejak tahun 2008/2009, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas, telah menyusun *Roadmap* untuk perbaikan kondisi tersebut. *Roadmap* yang disusun mempunyai Visi, yaitu “Meningkatnya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi wilayah sungai yang bersih, sehat dan produktif serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat”. *Roadmap* WS Citarum merupakan rencana kegiatan yang komprehensif, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Dalam pengelolaan sumber daya air terpadu Citarum, pemerintah mendapat bantuan donor dari asing salah satunya Asian Development Bank (ADB) sehingga munculah program ICWRMIP, dan untuk mensinkronisasikan program yang ada di pusat dengan pelaksanaan program yang ada propinsi maupun di Kabupaten /Kota Pemerintah membuat yang namanya Tim SPOKI baik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari informan Bappeda subdit transportasi dan pengelolaan SDA

Bappeda Kabupaten Bandung yang juga menjadi anggota SPOKI Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa:

“Awal 2010, sebelum Pak Bupati sekarang menjabat, dari pusat konsultan ICWRMIP pada datang bawa program, pertama-tama kita agak sulit mengidentifikasi untuk apa dan kemana arahnya, karena komponennya banyak, karena hal itu terdiri dari beberapa kementerian, program ICWRMIP sama dan Loannya sama dari ADB tapi yang datang orangnya beda-beda (konsultannya). tapi masing2 punya proyek. Kita berfikir karena melibatkan Kabupaten Bandung, berarti itu tugas kita. Hal ini seperti proyek mutilasi (hal yang terpotong seperti mozaik yang terpotong-potong, dari semua kementerian pada datang bawa proyek. Ada salah satu fungsi mereka yaitu kelembagaan tapi kita menggiring ke arah perencanaan. Karena Beberapa Kementerian datang dan juga Konsultan Program ICWRMIP, jadi proyeknya beda-beda dan harus diturunkan ke masing-masing dinas, kita Bappeda Kabupaten Bandung yang menghubungkan pecahan masing-masing mozaik itu. Misalnya Kementerian PU punya mozaik, kita yang menyambungkan. Kementerian Kesehatan juga sama, kita yang menyatukan tapi satu yang sama visinya adalah membuat kelembagaan” (Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Juni 2015).

Dalam rangka mengetahui perkembangan kinerja *Roadmap* WS Citarum, Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas menyelenggarakan kegiatan yang disebut *Independent Monitoring & Evaluation* (IME), sebagai salah satu komponen dari Program *Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program* (ICWRMIP) dengan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Roadmap* WS Citarum, efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, dampak dan manfaat dari aspek keuangan serta kondisi fisik yang dicapai.

Salah satu kegiatan IME diwujudkan dalam bentuk penyusunan alat (*tool*) pemantauan dan evaluasi kondisi WS Citarum, berupa *Score-card* sebagai hasil kegiatan pemantauan. Sedangkan hasil evaluasi akan berbentuk sebuah laporan hasil evaluasi dan rekomendasi, yang disajikan secara deskriptif-analitis, untuk perbaikan pelaksanaan *Roadmap* WS Citarum. *Score-*

card disusun dengan harapan akan menjadi suatu alat untuk mengetahui “Nilai” kondisi dari WS Citarum, yang meliputi kondisi fisik (state of basin), kondisi sosial ekonomi, kondisi kelembagaan dan kebijakan, kondisi pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) serta Program Intervensi Pembangunan dari masing-masing kabupaten dan kota yang ditujukan untuk perbaikan WS Citarum.

Dalam rangka kegiatan penyusunan *scorecard* tersebut, maka diperlukan melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD dilaksanakan di 6 Kabupaten dan Kota di WS Citarum, yang mewakili wilayah hulu, tengah dan hilir. 6 Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan waktu pelaksanaan FGD di Kabupaten Bandung pada tanggal 5 juni 2013. Pelaksanaan FGD melibatkan SKPD/OPD yang terkait dengan penanganan sektor-sektor yang ada di dalam ICWRMIP, yaitu lingkungan hidup, penanganan bencana, pertanian/ perkebunan/ kehutanan, peternakan dan perikanan, sanitasi/ kesehatan, kebersihan/persampahan, air bersih, industri, perumahan/permukiman, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnyapeserta FGD monev di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1 Peserta FGD Monev Penanganan WS Citarum

No	Lokasi	Peserta
1.	Kabupaten Bandung	BadanPerencanaan PembangunanDaerah(Bappeda)
2.		Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup(BPLH)
3.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)
4.		Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
5.		Dinas Peternakan dan Perikanan

6.		Dinas Kesehatan
7.		Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi
8.		Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan
9.		Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
10.		Konsultan ICWRMIP Sub-component 8.2 : IME

Sumber: Proceeding FGD Monev Penanganan WS Citarum Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project, Oktober 2013.

Dari hasil FGD tercatat bahwa ada dua isu pokok yang dialami oleh Kabupaten Bandung, yaitu masalah ketersediaan data & koordinasi antar instansi pemerintah. Data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bandung misalnya, disarankan untuk dilakukan *review*, karena ada banyak program kegiatan Citarum yang dilakukan oleh beragam institusi pemerintah di Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk obyek yang sama, data yang dihasilkan oleh masing-masing institusi pemerintah bisa berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga diperlukan kesamaan persepsi, guna meningkatkan validitas data. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh IME ini dilakukan dengan *Scorecard*.

Scorecard merupakan suatu bentuk alat untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap kondisi Citarum, dengan memotret apa adanya, dan disusun dengan harapan dapat mengetahui “nilai” kondisi WS Citarum, yang meliputi kondisi fisik, perubahan kondisi sosial ekonomi, kondisi kelembagaan & kebijakan, pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu (PSDAT) dan program intervensi pembangunan dari masing-masing kabupaten / kota, untuk mewujudkan perbaikan WS Citarum. Beberapa solusi sudah dilakukan oleh Kabupaten Bandung untuk mengatasi kendala koordinasi, melalui kerja sinkronisasi & koordinasi dalam Tim SPOKI.

Dalam FGD tersebut juga dipresentasikan bahwa : *Score-card* bersifat *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound(SMART)*, dan dikoordinasikan dengan TKPSDA, sehingga setelah Proyek IME berakhir akan dilakukan *transfer knowledge* kepada TKPSDA. *Score-card* akan memberikan gambaran/potret penanganan Citarum secara menyeluruh, melibatkan banyak aspek. Untuk membuat *score-card* dibutuhkan ketersediaan data dari semua OPD yang bersangkutan, dan yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam program *Roadmap* WS Citarum.

BPLH Kabupaten Bandung merupakan salah satu peserta instansi yang di undang dalam kegiatan Independent dan Monitoring Evaluation 5 Juni 2013. Menurut informan Ibu Linda M.-BPLH:

”Menurut catatan BPLH, industri yang mengeluarkan limbah cair sebanyak >100 industri. Oleh karena itu perlu dilakukan cek ulang dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindag. BPLH mengambil sampel kualitas air setiap tahunnya di 75 titik, meliputi Situ Cisanti & 5 Sub DAS yang ada di Kab. Bandung. Dari hasil perhitungan ada trend ke arah “perburukan - tercemar berat”, dan yang nilai score “sedang” hanya Situ Cisanti. Oleh karena itu diperlukan pemilahan & pemeriksaan ulang data-data dari berbagai sumber, termasuk data yang berasal dari ICWRMIP”
(Wawancara dengan kabid Pencemaran BPLH Kabupaten Bandung pada tanggal 08 Juni 2015).

Kemudian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung pada acara Independent monitoring dan Evaluasi (IME) Wilayah Sungai Citarum merupakan salah satu dinas yang menjadi peserta yang dilaksanakan pada 5 juni 2013, dari hasil notulensi acara tersebut, peneliti melihat bahwa Dinas memberikan masukan tentang penanangan terpadu atau program ICWRMIP. Pada kegiatan ini masukan yang diberikan oleh informan adalah:

“Saat ini, Kemenhut sedang melakukan kaji ulang atas lahan kritis, sehingga untuk sementara, kebutuhan data dapat menggunakan Data Kemenhut tahun 2009. Untuk tutupan lahan di Provinsi Jawa Barat, saat ini sudah mencapai 32,5%, dari target pencapaian Provinsi Jawa

Barat 45%. Ada banyak data kehutanan dengan objek & lokasi sama tetapi hasil berbeda, oleh karena itu lebih baik jika menggunakan Data Statistik Kehutanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Program Pertanian mengarah pada Agroforestry, yang penanganannya lintas sektoral & lintas wilayah, (Monev IME 05 Juni 2013).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Merupakan salah satu peserta yang di undang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013, tetapi peserta dari utusan ini juga tidak memberikan masukan atau saran. Terkait dengan masalah penanganan terpadu Wilayah Sungai Citarum yang berlokasi di Kabupaten Bandung, peneliti juga belum melihat keterlibatannya baik di program ICWRMIP maupun Citarum bestari melalui matriks pekerjaan multi pihak penanganan Citarum segmen I (Situ Cisanti-Majalaya) tahun 2014 per tanggal 17 januari 2014.

Dinas Peternakan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan Independent, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum yang dilaksanakan pada 5 Juni 2013, dari hasil notulensi acara tersebut terdapat masukan yang disampaikan oleh informan yaitu :

”Indikator untuk kegiatan peternakan, jangan hanya jumlah RPH, tetapi lebih penting adalah seberapa besar jerohan yang dihasilkan, yang dibuang ke sungai? kemudian, tidak mungkin mengukur jumlah produksi ikan air tawar yang berasal dari sungai, karena memang tidak ada data. Indikator kualitatifnya adalah, jika di sungai banyak ikannya, maka kondisi fisik sungai adalah baik. Usaha budidaya perikanan sangat membutuhkan air” (Wawancara Informan dari Staf Dinas Peternakan dan Perikanan tanggal 05 Mei 2015).

Dalam pernyataan informan dapat diketahui sebaiknya untuk melihat beban pencemaran yang dilakukan oleh hewan ternak seharusnya dilihat juga dari berapa banyak limbah kotoran yang dikeluarkan oleh hewan ternak setiap harinya. Karena selama ini, hanya berpatokan pada jumlah hewan ternak yang ada. Kemudian potensi budidaya perikanan sangat bagus di Kabupaten Bandung,

tapi semua itu membutuhkan air, air yang bersih dan salah satu ciri sungai memiliki kualitas air yang baik adalah dengan banyaknya ikan di sungai.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013. Pada kegiatan tersebut informan memberikan masukan tentang :

”Baseline data memerlukan kesamaan persepsi & validitas data. Objek data yang sama, tetapi data yang dihasilkan dari tiap-tiap OPD bisa berbeda, misal: infrastruktur sanitasi dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya.”

Dari pernyataan yang dijelaskan di atas, diketahui bahwa data base yang dimiliki sering kali berbeda, sehingga harus menentukan rujukan mana yang harus digunakan supaya ada kesamaan persepsi.

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan merupakan salah satu peserta yang diundang dalam kegiatan independent Monitoring dan Evaluasi (IME) pada tanggal 5 Juni 2013. Pada kegiatan tersebut informan memberikan masukan tentang :

“Data dari Kab. Bandung masih perlu direview. Telah terjadi pendekatan yang terbalik, kami sudah diperiksa oleh BPK berkaitan dengan Citarum, dan seharusnya pembuatan *scorecard* dilakukan diawal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan. sejauhmana program sudah memberi manfaat sehingga untuk mengukur program pemulihan & rehabilitasi perlu dilakukan pendekatan “*Benefit Cost Ratio*”, (Wawancara Informan dengan Staf Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan pada tanggal 12 Juni 2015).

Sedangkan untuk mengukur sedimentasi pada rapat monev tersebut terdapat masukan dengan diperlukan studi banding ke WS Brantas dan WS Bengawan Solo yang dinilai sudah lebih maju. Penanganan sampah di Kab. Bandung harus menjadi prioritas, dan jangan hanya sampah yang ada di Waduk Saguling. Sampah di Kabupaten Bandung, seperti yang ada di Citepus merupakan kiriman dari Kota Bandung. Sehingga harus dilihat seberapa besar komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani

sampah dan juga seberapa besar kontribusi masyarakat dalam penanganan sampah.

Dari pernyataan dan masukan informan di atas tersebut diketahui bahwa harusnya pembuatan *balance scorecard* dilakukan di awal program sehingga dijadikan tolak ukur dalam melakukan pemeriksaan mengenai keberhasilan atau tidaknya program tersebut dilaksanakan.

Dari wawancara yang dilakukan, informan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung menyatakan mengenai monev ini adalah :“Monitoring tidak berkelanjutan, sehingga kegiatan banyak menguap di jalan. Bersifat sample, sehingga tidak meluas ke tempat lain. Sehingga masyarakat Kurang rasa memiliki terhadap Citarum” (Wawancara dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 12 juni 2015).

Hal senada juga dinyatakan oleh informan dari Dinas Kesehatan bahwa: “Kegiatan monitoring & evaluasi tidak dapat berjalan baik, karena tidak dilaksanakan secara terus menerus, tidak berkelanjutan” (Wawancara dengan Dinas Kesehatan, 2 juni 2015).

Pemantauan menurut Bryant dan white (1987:91) adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan ketika kegiatan atau proyek sedang berlangsung sebagai umpan balik sehingga dapat dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian segera jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak atau belum selesai dengan kondisi yang diinginkan. Sementara itu menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2006:131) pemantauan merupakan pemeriksaan berkelanjutan (terus menerus) terhadap hasil akhir laporan pengawasan berjenjang.

Menurut Bryant dan White (1987 : 193) proses pemantauan ini juga dibutuhkan guna memeriksa sistem manajemen khususnya yang berhubungan dengan jenis-jenis insentif yang tersedia bagi para pelaksana dan manajer dalam melakukan pekerjaannya masing-masing.

Bagian terpenting dari kegiatan pemantauan ini adalah terkumpulnya bahan dan data sehingga dapat dilakukan umpan balik yang berlangsung secara kontinyu mengenai berbagai hal seperti cara-cara serta penggunaan berbagai sumber daya yang ada. Umpan balik dapat diperoleh dari memorandum dan laporan-laporan resmi bagi seluruh staf maupun dapat pula yang bersifat informal.

Pengendalian dan pemantauan ini harus difahami supaya dapat diketahui dengan pasti bagaimana proses pengendalian atau pemantauan dilakukan dalam berbagai kegiatan yang merupakan implementasi dari perencanaan yang ada. Wrihatnolo dan Nugroho (2016 : 132-133) mendefinisikan pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi perencanaan yaitu :

“Rangkaian kegiatan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, suatu proses pengendalian dan pemantaun pembangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip :1. Pengendalian pembangunan diarahkan pada efisiensi pengeluaran negara; 2. Pengoptimalan tugas pokok dan fungsi lembaga negara yang sudah ada; 3. Pengoptimalan peran serta masyarakat secara pro aktif dalam pengawasan penggunaan keuangan negara; 4. Penegakkan upaya penilaian terhadap kinerja implementasi perencanaan pembangunan”.

Pengelolaan sumber daya air Citarum merupakan urusan atau kewenangan pemerintahan, yang mempunyai konsekuensi kebijakan yang publik yang harus dikoordinasikan. Menurut Riant Nugroho (2011: 665) kebijakan publik merupakan sebuah manajemen, maka seharusnya ia dikendalikan dan bukan hanya dievaluasi. Kemudian Nugroho juga menambahkan bahwa pengendalian kebijakan tersebut terdiri dari 3 dimensi yaitu : 1.Monitoring kebijakan, atau pengawasan kebijakan; 2.Evaluasi kebijakan; 3.Pengganjaran Kebijakan. Maksudnya pengawasan berupa pemantaun dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga Nugroho (2011 : 665)

menyamakan istilah pengawasan dengan *on going evaluation* atau *formative evaluation*.

Kemudian evaluasi yang dimaksud adalah sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Penghargaan yang dimaksud adalah semacam istilah lain yang sering digunakan yaitu *reward* dan *punishment*, dimana tindakan penghargaan tersebut menurut Nugroho (2011: 666) terdiri dari insentif dan disinsentif. Jika hasilnya positif diberikan insentif, tetapi jika hasilnya negatif diberikan disinsentif. Kedua hal ini diperlukan didalam penghargaan karena jika monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak memberikan arti penting sehingga tujuan akhir dari penghargaan tidak akan terpenuhi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini merupakan salah satu kegiatan dari Unit Independent Monitoring and Evaluation (IME), sebagai bagian dari *Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project* (ICWRMIP) atau IME-Citarum. Kegiatan Unit IME-Citarum merupakan bagian dari Sekretariat *Roadmap* Coordination Management Unit (RCMU), yang ada di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas.

Menurut informan dari Bappeda Kabupaten Bandung, Monev yang dilakukan oleh konsultan memiliki nilai manfaat yang baik karena dapat membantu dan mengarahkan kegiatan. Hal ini diungkapkan melalui pernyataannya bahwa :

“Evaluasi beberapa waktu yang lalu pernah ada, yang melakukan evaluasi itu konsultan. Dalam ICWRMIP Komponen itu besar, dan merupakan program dari pusat. Sedangkan kita (Bappeda Kabupaten Bandung) mengarahkan ke tugas saja, untuk koordinasi. Di tingkat pemerintahan permasalahannya kompleks. Sehingga kalau mau Tim SPOKI diteruskan itu butuh konsultan” (Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Bandung Tanggal 18 Juni 2015).

Dari data di lapangan diketahui bahwa, monev dilakukan oleh IME. Sedangkan di SKPD terkait *concern* dengan kegiatannya masing-masing. Hal

ini memungkinkan tidak ada pengganjaran kepada staf yang terlibat dalam penanganan terpadu Wilayah Sungai Citarum. Ketika hal ini ditanyakan kepada staf atau sdm yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air terpadu Citarum di Kabupaten Bandung apakah ada pengganjaran atau *reward* dan *punishment* terhadap pihak yang terlibat, informan menyatakan “*No Comment*”. Kalaupun ada monev yang dilakukan masih terbatas bahkan sangat minim, pengendalian yang dilakukan masih terbatas selama ini hanyalah pada upaya meminta laporan dan rencana kegiatan di masing-masing SKPD dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

Sementara dari pelaksana kegiatan kesulitan melakukan koordinasi, hal ini dikarenakan pelaporan yang disampaikan tidak di buat oleh mereka sendiri melainkan dikerjakan oleh konsultan, sehingga mereka mengerjakan kegiatan lainnya yang menjadi program atau kegiatan di instansi mereka sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan dari Bappeda Bandung yang menyatakan bahwa :

”Di Bappeda Kabupaten Bandung itu berat, karena SDM sedikit. Saya saja hanya memiliki 2 staf sedangkan pekerjaan banyak. Kalaupun Tim SPOKI mau diaktifkan kembali harus ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) seperti apa ke depannya kemudian perlu ada konsultan. Karena yang dikerjakan sangat banyak, itu saja masih yang ICWRMIP, belum lagi yang Citarum Bestari (Program Propinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum) karena kalau mereka gerak kita ikut, belum ada yang evaluasi tim kitanya, harusnya yang evaluasi Tim SPOKI Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan objek yang dilakukan pada program Citarum Bestari itu juga sama di Kabupaten Bandung tetap saja yang yang mengkoordinasikan Tim SPOKI. Semua ini dikarenakan banyak program, selain ICWRMIP dan Citarum Bestari ada juga misal dari CSR. Padahal dari semua program-program itu bisa terdokumentasi garapan yang ada di Kabupaten Bandung”, (Wawancara dengan informan Bappeda Kabupaten Bandung tanggal 09 juni 2015).

Dengan demikian, terlihat berdasarkan penelitian bahwa pada tahapan monitoring dan evaluasi, belum dilakukan pengendalian. Masih dalam menginventarisir permasalahan untuk menyamakan database permasalahan

yang ada. Kalaupun ada umpan balik, berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak-pihak pelaksana yang dalam hal ini adalah organisasi-organisasi pemerintah/instansipemerintah. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak ada pengganjaran baik reward dan punishment terhadap SDM yang ikut terlibat dalam penanganan terpadu wilayah sungai Citarum.

Simpulan

Evaluasi ICWRMIP (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*) atau Program Investasi Manajemen Sumber Daya Air Citarum Terpadu di Hulu DAS Citarum dilakukan oleh konsultan *Independent Monitoring and Evaluation* (IME) Citarum. Dalam pelaksanaan evaluasi IME mempunyai peran yang sangat besar sehingga ketika konsultan sudah tidak mendampingi, program tidak bisa berjalan. Karena kurangnya komunikasi, timbul juga kesulitan dalam membangun persepsi yang sama seperti: penentuan hulu das citarum, antara pusat dan propinsi berbeda, kemudian ada ego sektoral antara pusat antar kementerian, sehingga pada tingkatan di propinsi dan Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bandung juga mengalami kesulitan komunikasi, karena semua hanya sibuk mengerjakan kegiatan yang bedasarkan dengan program dan kegiatan masing-masing. Demikian pula dengan kondisi sumberdaya manusia yang masih terbatas, berupa sikap, mental dan budaya personil yang menjadi penghambat efektifnya koordinasi. Kemudian pengganjaran baik itu berupa *reward* dan *punishment* belum diberlakukan, padahal dengan ketiadaan insentif baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk non materiil bisa menjadi masalah dalam pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bryant, Coralie dan Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. USA: Penerbit Lay Holt, Richart and Wiston.

- Creswell. John.W.1996. *Qualitative Inquiry & Research Design*. Third Edition, Sage Publication Inc.
- Howlett,Michael dan Ramesh,2003,*Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*,Oxford University Press.
- Jones, Gareth R.1991.*Organizational Theory : Text and Cases*. Addison-Wesey Publishing Company, Inc
- Maxwell, Joseph A, 1996, *Qualitative Reserach Design*, Sage Publication Inc, Californiatyy
- Moleong,J Lexy.2000.Metode Penelitian Kualitatif,Bandung,Rosdakarya.
- Mustopadidjadja,Ar.2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik,Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja,Jakrata:LAN.
- Nugroho Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho Ryant, 2011. *Public Policy. Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rosenbloom, David, Robert, S.Kravcuk, 2005. *Public Administration: Understanding Mangement, Politics and Law in The Public Sector*,New York:Mc Graw Hill.
- Wibowo,2010.Budaya Organisasi Sebuah Kebutuhan Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang. Rajagrafindo Persada.
- Wrihatnolo, Randy R dan Nugroo,Ryant.2006.Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan). Jakarta: Elex Media Komputindo

B. Peraturan Perundangan dan Dokumen

UU Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 6 No:04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 594/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Cibaliung-Citarum (WS 6 CI)

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:050.05/Kep.15589-Bapp/2011 tentang Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Optimalisasi Kerjasama Institusi dalam Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 224/KPTS/M/2013 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum Cita Citarum, Rencana Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum 2010-2025

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:197/KPTS/M/2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum

Proceeding Focus Group Discussion Pengenalan dan Simulasi Score-card dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penanganan WS Citarum Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project (ICWRMIP) Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME) Oktober 2013.

The International Hydrological Programme of UNESCOe and The Network of Asia River Basin Organization (NARBO) 2009.Introduction to the IWRM Guidelines at River Basin Level, The United Nation World Water Assessment Programme, UNESCO,Paris.